

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang diberikan kepada mereka seusia sekolah berasal dari keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendidikan No.10 Tahun 2020, bahwa Program Indonesia Pintar yang disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah untuk membiayai pendidikan.

Melansir dari laman Kemendikbud, Program Indonesia Pintar diwujudkan pertama kali dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014, dan beroperasi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP diberikan sebagai identitas untuk para pelajar yang terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan, dan memberikan jaminan terhadap mereka.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan standar sumber daya manusianya. Dengan demikian, pendidikan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Permasalahan pemerataan pendidikan memang dianggap sebagai tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu alasan mengapa pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum stabil adalah

kurangnya aksesibilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Kemiskinan juga menjadi hambatan seseorang untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Hal ini mengakibatkan angka putus sekolah semakin meningkat. Keberhasilan Program Indonesia Pintar juga dapat dilihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah di Indonesia, sesuai dengan tujuannya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar yaitu pemberian bantuan PIP untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi ke bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi peserta didik dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah (Dimmera & Purnasari, 2020).

Implementasi melalui program Indonesia Pintar (PIP) perlu dilakukan karena program ini memiliki banyak kepentingan, seperti dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dapat berdampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, selain itu program ini dapat menekan angka putus sekolah, sehingga melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah, serta melalui program ini diharapkan dapat mencapai semua

lapisan masyarakat, termasuk anak-anak difabel juga dapat mengakses pendidikan yang setara.

Pelaksanaan PIP tentunya memiliki tugas atau pengelola PIP untuk menjalankan program tersebut. Pemeran utama dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan. Secara umum tugas dan peran pengelola PIP diatur dalam petunjuk pelaksanaan PIP sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Tugas dan fungsi Pengelola PIP

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota
<p>Pengelola PIP tingkat pusat merupakan direktorat jenderal yang menangani pendidikan non formal, yaitu Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, SMK, dan kesetaraan. Pengelola tingkat pusat bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan petunjuk pelaksanaan PIP. Menyalurkan dana bantuan PIP Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat terkait dengan PIP; Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP; dan Melaporkan pelaksanaan PIP. Mengidentifikasi, sinkronisasi data peserta didik calon penerima PIP dari usulan sekolah Menetapkan daftar penerima PIP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) direktur 	<p>Pengelola PIP tingkat provinsi merupakan Dinas Pendidikan Provinsi bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; dan Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya. Menginformasikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima PIP kepada peserta didik penerima melalui sekolah/lembaga. Berkoordinasi dengan bank penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana PIP oleh peserta didik penerima. Menetapkan tugas/tim data/manajemen PIP tingkat provinsi (jenjang SMA dan 	<p>Pengelola PIP tingkat kabupaten/kotamerupakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yang bertugas;</p> <ol style="list-style-type: none"> mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya. Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya Menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi PIP di wilayahnya Memantau dan mendorong kepala sekolah dan pimpinan/kepala lembaga untuk

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kota
teknis terkait. h. Menetapkan bank penyalur dana PIP.	SMK)	mengidentifikasi dan melaporkan anak usia sekolah. f. Menetapkan petugas/tim data/manajemen pip tingkat kabupaten/kota (jenjang SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C)

Sumber: Permendikbud No.9 tahun 2018, 2024 (telah diolah kembali)

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar masih dikatakan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukannya beberapa kendala. Beberapa masalah yang dihadapi baik di Dinas Pendidikan dan sekolah memiliki keluhan mengenai adanya siswa yang tidak menerima bantuan dari PIP. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh siswa yang lupa melapor ke sekolah lanjutan (SD ke SMP atau SMP ke SMA) bahwa yang bersangkutan adalah penerima PIP, persyaratan penerima yang tidak terpenuhi, kesalahan dalam penginputan data oleh operator, atau ketidaksinkronan data antara DTKS dengan dapodik (Ombudsman RI, 2021)

Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pelaksanaan Program Indonesia belum memadai. Pada semester II 2020 tercatat ada anggaran PIP sebesar Rp. 2,68 triliun yang rawan disalahgunakan karena bantuan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Data pokok pendidikan (Dapodik) yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima tidak handal, sedangkan Nomor Induk Siswa

Nasional dan Nomor Induk Kependudukan belum digunakan sebagai acuan. Selain itu, sebanyak 2.455.174 siswa penerima PIP yang berasal dari keluarga PKH atau KKS kehilangan kesempatan karena tidak diusulkan dalam SK penerimaan bantuan PIP (Cnbc Indonesia, 2021).

Adapun beberapa contoh kasus terkait kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar seperti yang ditemukan oleh Lisa Mandasari (2021) melalui penelitiannya yaitu mengenai Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan bahwa masih ditemukannya dana bantuan Program Indonesia Pintar yang digunakan oleh orang tua/wali murid untuk kebutuhan pribadi (Mandasari, 2021).

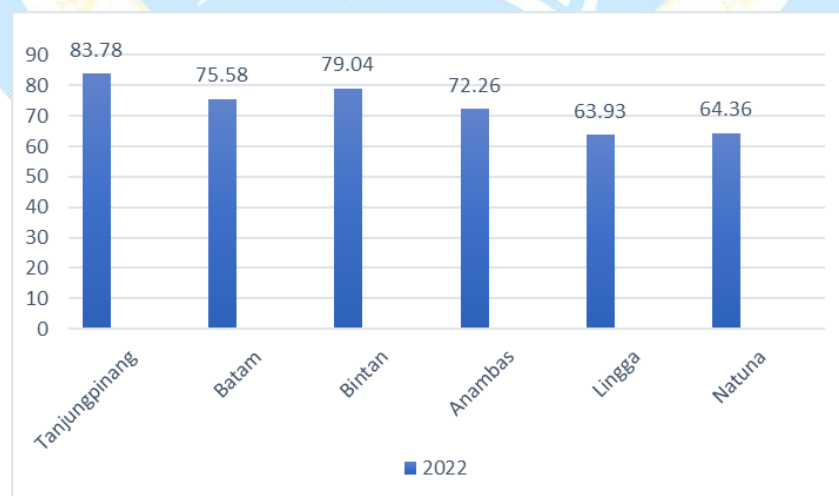
Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Endang Suparman (2020) yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang Program Indonesia Pintar menemukan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi yaitu masih seringkali ditemukan peserta didik penerima dana PIP tetapi juga tercatat sebagai pemanfaat di program bantuan lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya. Hal ini tentu sangat tidak ideal dimana masih banyak peserta didik lainnya yang sama sekali belum mendapatkan bantuan apapun, baik itu dari PIP dan PKH (Suparman, 2020).

Permasalahan lainnya dijelaskan juga oleh Nurokhmah (2021) dalam penelitiannya terkait Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu terdapat pendistribusian yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar dimana masih adanya penerima PIP yang bukan dari golongan miskin tidak memperoleh program tersebut. Selain itu juga adanya

keterlambatan pendistribusian pada daerah-daerah terdepan, terpencil, terluar (3T) salah satunya di sekolah-sekolah di Kabupaten Bengkayang dimana infrastruktur yang belum memadai, sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi mengenai penyaluran dana PIP, serta memerlukan biaya transportasi yang cukup besar untuk mengambil dana bantuan PIP di Lembaga penyalur (Nurokhmah, 2021).

Disamping itu dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Provinsi Kepulauan Riau dilansir pada laman Puslapdik, di tahun 2020 Provinsi kepulauan Riau memperoleh persentase yang tinggi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar yaitu sebesar 94,27%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi 53,53%. Di tahun berikutnya, penyaluran Program Indonesia Pintar mengalami peningkatan kembali menjadi 73,08% (Puslapdik, 2023).

Gambar 1.1 Penyaluran PIP di Provinsi Kepri Tahun 2022



Sumber: Puslapdik, Kemendikbud 2024

Dalam gambar diagram tersebut menunjukkan di data tahun 2022 penyaluran Program Indonesia Pintar di Provinsi Kepulauan Riau terlihat bahwa kota Tanjungpinang memperoleh jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) terbanyak yaitu sebesar 83,78% dibandingkan kota yang lain. Meski demikian, hal ini tidak menutup angka pertumbuhan partisipasi sekolah yang ada di kota Tanjungpinang pada tingkat usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Tanjungpinang yang mengalami penurunan di tahun 2022, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1.2 Pertumbuhan Angka Partisipasi Sekolah di Tanjungpinang

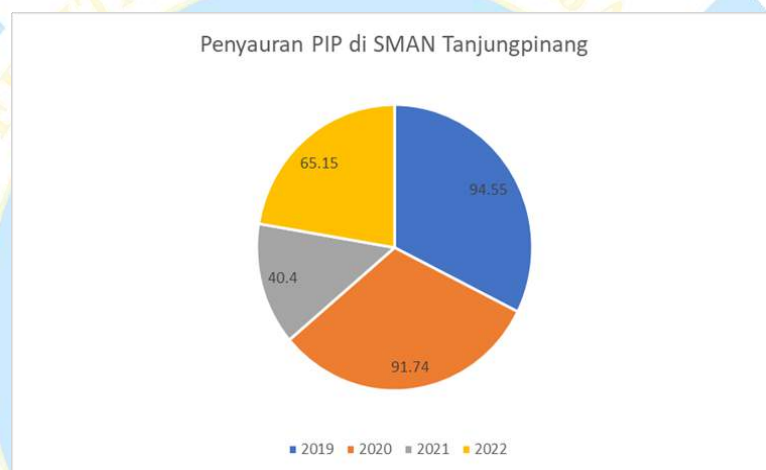
Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)		
	2020	2021	2022
7-12 (SD/MI)	99,62 %	99,55 %	99,49 %
13-15 (SMP/MTs)	99,20 %	98,88 %	99,50 %
16-18 (SMA/MA)	91,51%	91,06 %	87,16 %

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang, 2023

Berdasarkan penjelasan sebelumnya peneliti akan melakukan penelitian pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kota Tanjungpinang, hal ini dikarenakan pertumbuhan angka partisipasi sekolah yang ada pada tingkat SMAN jauh lebih menurun dibandingkan tingkatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dilihat dari usia sekolah pada tabel 1.1. sehingga peneliti berinisiatif untuk melihat bagaimana implementasi

Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMAN di kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pertumbuhan angka partisipasi sekolah melalui program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada diagram gambar di bawah ini mengenai penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) pada tingkat SMAN di kota Tanjungpinang.

Gambar 1. 2 Penyaluran PIP Tingkat SMA di Tanjungpinang



Sumber: Kemendikbud (Olahan Peneliti, 2023)

Berdasarkan data Kemendikbud penyaluran Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) diatas menunjukkan bahwa penyaluran PIP pada tahun 2019 penyaluran PIP pada tingkat SMAN sebesar 94,55%. Kemudian di tahun 2020 penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang sebesar 91,74%. Namun pada tahun 2021 penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang mengalami penurunan sebesar 40,40%. Sedangkan pada tahun 2022, penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang mengalami sedikit peningkatan

berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 65,15%. Perkembangan terhadap peningkatan penyaluran PIP pada tingkat SMAN di Kota Tanjungpinang dilihat dari data tahun 2022 menunjukkan dampak positif, dikarenakan tahun sebelumnya mengalami penurunan secara drastis.

Permasalahan yang umumnya terjadi dalam implementasi Program Indonesia Pintar di Indonesia, terutama terkait dengan alokasi kuota. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwa meskipun Program Indonesia Pintar ini dianggap berhasil memenuhi kebutuhan siswa dan membantu keluarga kurang mampu, tetapi kuota yang diberikan di Tanjungpinang dinilai masih kurang memadai. Meskipun pihak Dinas Pendidikan Provinsi sudah diajukan untuk penambahan kuota, namun pemerintah pusat masih menggunakan angka kemiskinan secara nasional sebagai dasar perhitungan, sehingga hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan dan kondisi di setiap daerah. Fenomena fluktuasi (perubahan) data kemiskinan yang sering terjadi setiap tahun juga menjadi perhatian, yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi data yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Pengurangan kuota di kota Tanjungpinang yang disebabkan oleh pertimbangan tingkat kemiskinan yang berkurang, menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kondisi ekonomi telah terjadi di wilayah tersebut. Namun, hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan distribusi bantuan yang diberikan, terutama bagi daerah yang masih membutuhkan bantuan program tersebut. Tanggapan dari pemerintah pusat yang

menyatakan bahwa pengurangan kuota merupakan hasil dari penyesuaian dengan angka kemiskinan per provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mengklaim adanya peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

Namun, tanggapan dari pemerintah pusat terhadap pemberian kuota di kota Tanjungpinang belum sepenuhnya memuaskan karena tidak memberikan solusi konkrit terkait kekurangan kuota yang dirasakan oleh masyarakat (siswa) yang membutuhkan.

Untuk melihat jumlah siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dapat diringkas melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.3 Jumlah Siswa Penerima PIP Tingkat SMA Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun 2023

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa
1	SMAN 1 TANJUNGPINANG	180
2	SMAN 2 TANJUNGPINANG	230
3	SMAN 3 TANJUNGPINANG	71
4	SMAN 4 TANJUNGPINANG	239
5	SMAN 5 TANJUNGPINANG	90
6	SMAN 6 TANJUNGPINANG	92
7	SMAN 7 TANJUNGPINANG	75

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kepri, 2024 (Olahan Peneliti)

Berdasarkan data pada tabel 1.2, diketahui bahwa jumlah siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) ini paling banyak berada pada sekolah SMAN 4 Tanjungpinang yaitu sebanyak 239 siswa, di urutan kedua pada sekolah SMAN 2 Tanjungpinang, urutan ketiga pada sekolah SMAN 1 Tanjungpinang, urutan keempat pada sekolah SMAN 6 Tanjungpinang,

urutan kelima pada sekolah SMAN 5 Tanjungpinang, urutan keenam pada sekolah SMAN 7 Tanjungpinang, sedangkan pada sekolah SMAN 3 Tanjungpinang mendapatkan jumlah paling sedikit yaitu sebanyak 73 siswa.

Dari data yang diberikan, terlihat bahwa SMAN 4 Tanjungpinang memiliki jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang paling banyak dibandingkan dengan sekolah lainnya di kota Tanjungpinang pada tahun 2023. Dengan demikian, memilih SMAN 4 Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian memberikan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi dan dampak dari Program Indonesia Pintar di sekolah tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Tanjungpinang (Studi di SMA Negeri 4 Tanjungpinang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Uraian ringkas dalam latar belakang di atas memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimanakah pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Tanjungpinang khususnya pada SMAN 4 Tanjungpinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Tanjungpinang khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) khususnya pada Sekolah SMAN 4 Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hal ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data untuk keperluan penulisan skripsi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ilmu sosial dan politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
- b. Memanfaatkan pengetahuan, khususnya dari dunia akademik dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di kota Tanjungpinang, serta sebagai referensi peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan penulis mengenai implementasi Program Indonesia Pintar di sekolah-sekolah.

b. Bagi pihak sekolah/masyarakat

Temuan studi ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak sekolah dan khususnya kepada siswa/siswi dengan menerapkan Program Indonesia Pintar dan melalui program ini dapat meningkatkan angka partisipasi siswa dalam keberlanjutan pendidikan kedepannya.

c. Bagi pemerintah

Temuan studi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan kedepannya.

